



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan tahun ke IV pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja ini dalam bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan **Good Governance dan clean Government**.

Kefamenanu, 18 Maret 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU 



IR MARSELINA SUMU
Pembina Utama Muda
NIP. 196606141992032011



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	(i)
Daftar Isi	(ii)
Daftar Tabel	(iii)
Daftar Gambar	(iv)
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	8
D. Landasan Hukum	10
E. Sistematika	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kerja Tahun 2024	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	30
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
BAB IV. PENUTUP	35
LAMPIRAN	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN	
KABUPATEN TTU	



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	(i)
Daftar Isi	(ii)
Daftar Tabel	(iii)
Daftar Gambar	(iv)
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	8
D. Landasan Hukum	10
E. Sistematika	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kerja Tahun 2024	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	30
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
BAB IV. PENUTUP	35
LAMPIRAN	
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	3
Tabel 1.2 Jumlah ASN dan PPPK Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	3
Tabel 1.3 Jabatan Struktural Pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU.....	4
Tabel 1.4 Aset-aset pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU.....	5-6
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU.....	13
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kab . TTU.....	13
Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahun 2024	14
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 2.6 Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	15-16
Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 2.8 Perubahan Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	17-18
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	19-20
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja	21
Tabel 3.3 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	24
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	25
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	26-27
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	28-29
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran	30-31
Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Tujuan dan Sasaran	31
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	32-34



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU.....	7



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenaha kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi perangkat daerah sebagai sub sistim dari sistim pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaran pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan UUD No. 28 TA. 1999 tetang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) maka diterbitkan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.



B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas .

tugas pokok dan fungsinya serta susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi :
6. Bidang Keamanan Pangan, membawahi :
7. Sub Koordinator Substansi Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD

1.1. Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan juga menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan bidang pangan
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2. Sumber Daya

Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Timor Tengah Utara dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi memiliki beberapa personil yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT/Honorar) berjumlah 4 (empat) orang yang memiliki jenjang pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan struktural yang berbeda-beda. Untuk mengetahui jumlah ASN dan PTT berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kepegawaian	Pendidikan					JUMLAH
		SD (Org)	SMP (Org)	SMA (Org)	DIPLOMA/SARJANA (Org)	PASCA SARJANA (Org)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ASN	-	-	3	24	2	26
2	PPPK	-	-	-	3	-	3
23	PTT	-	-	3	3	-	6
TOTAL							35

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ASN, PPPK dan PTT pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU lebih banyak berpendidikan Sarjana (S2) sebanyak 2 Orang atau 7,25%, Diploma/ Sarjana (S1) sebanyak 24 orang atau 82,75% dan SMA/SMK sebanyak 3 orang atau 10%

Jumlah ASN dan PPPK berdasarkan pangkat/golongan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah ASN dan PPPK Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Pembina Utama Muda / IV- c	1
2.	Pembina / IV-a	5
3.	Penata Tk. I / III-d	12
4	Penata / III-c	-
5.	Penata Muda Tk. I / III-b	4
6.	Penata Muda / III-a	6
7.	Pengatur Muda / II-d	1
Total		29

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Dari tabel di sebelah dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN dan PPPK terbanyak dengan pangkat/golongan Penata Tk. I / III-d sebanyak 12 orang atau 41 %

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi ASN diberikan kepercayaan untuk menduduki sebuah jabatan struktural dan fungsional umum sehingga dengan komitmen yang tinggi dapat menjalankan jabatan yang diamanahkan dengan rasa penuh tanggung jawab, etika



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

dan meningkatkan kapasitas kompetensi diri. Jabatan struktural dan fungsional umum yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

No.	Jabatan Struktural/Fungsional	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Ada
2.	Sekretaris Dinas	Ada
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ada
4.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Ada
5.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Ada
6..	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Ada
7.	Kepala Bidang Keamanan Pangan	Ada
8.	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Evaluasi	Ada
9.	Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset	Ada
10.	Sub Koordinator Substansi Ketersediaan Pangan	Ada
11.	Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Pangan	Ada
12.	Sub Koordinator Substansi Kerawanan Pangan	Ada
13.	Sub Koordinator Substansi Distribusi Pangan	Ada
14.	Sub Koordinator Substansi Harga Pangan	Ada
15.	Sub Koordinator Substansi Cadangan Pangan	Ada
16.	Sub Koordinator Substansi Konsumsi Pangan	Ada
17.	Sub Koordinator Substansi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Lowong
18.	Sub Koordinator Substansi Pengembangan Pangan Lokal	Lowong
19.	Sub Koordinator Substansi Kelembagaan Keamanan Pangan	Ada
20.	Sub Koordinator Substansi Pengawasan Keamanan Pangan	Ada
21.	Sub Koordinator Substansi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Ada

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jabatan struktural yang lowong pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU sebanyak 1 (satu) yaitu Sub Koordinator Substansi.



1.3. Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan memiliki aset-aset yang digunakan sebagai alat untuk menunjang terselenggaranya sebuah proses untuk mencapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu demi terwujudnya maksud dan tujuan tersebut Dinas Ketahanan Pangan memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. Sarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Aset-aset pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU

No.	Jenis Barang	Jumlah/luas	Keadaan	Sumber Dana
1	2	3	4	
1.	Tanah Bangunan Kantor	1 unit 8.545 M2	Baik	APBD II
2.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik	APBD II
3.	Sepeda Motor	17 Unit	Baik	APBD II
4.	Timbangan Pegas Kapasitas 50 Kg	1 Unit	Baik	APBD II
5.	Lemari Penyimpanan	26 Unit	Baik	APBD II
6.	Lemari Besi	1 Unit	Baik	APBD II
7.	Rak Kayu	6 Unit	Baik	APBD II
8.	Filling Besi/Metal	9 Unit	Baik	APBD II
9.	Lemari Makan	1 Unit	Baik	APBD II
10.	Lemari Kayu	8 Unit	Baik	APBD II
11.	Papan Visual	1 Buah	Baik	APBD II
12.	Rak Kayu	4 Buah	Baik	APBD II
13.	Meja Kayu	1 Unit	Baik	APBD II
14.	Kursi Besi/Metal	2 Unit	Baik	APBD II
15.	Kursi Kayu/Rotan	78 Unit	Baik	APBD II
16.	Meja Makan	4 Unit	Baik	APBD II
17.	Meja Panjang	5 Unit	Baik	APBD II
18.	Meja Komputer	2 Unit	Baik	APBD II
19.	Meja Biro	66 Unit	Baik	APBD II
20.	Sofa	6 Set	Baik	APBD II
21.	Kursi Plastik	210 Unit	Baik	APBD II
22.	Kursi Kerja	4 Unit	Baik	APBD II



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

23.	Lemari Es/Kulkas Mini	1 Unit	Baik	APBD II
24.	AC Split	1 Unit	Baik	APBD II
25.	Stabilisator	3 Unit	Baik	APBD II
26.	Dispenser	1 Unit	Baik	APBD II
27.	Handy Cam	1 Unit	Baik	APBD II
28.	Alat Rumah Tangga Lain2	1 Unit	Baik	APBD II
29.	Genset	1 Unit	Baik	APBD II
30.	P.C Unit Komputer	7 Unit	Baik	APBD II
31.	Laptop	12 Unit	Baik	APBD II
32.	Printer	16 Unit	Baik	APBD II
33.	UPS	2 Unit	Baik	APBD II
34.	Lemari Arsip Dinamis	12 Unit	Baik	APBD II
35.	Proyektor + Attacchment	3 Unit	Baik	APBD II
36.	Sound Sistem	1 Paket	Baik	APBD II
37.	Bangunan Gedung Kantor	4 Unit	Baik	APBD II
38.	Bangunan Gedung Tertutup	11 Unit	Baik	APBD II
39.	Bangunan Aula Pertemuan	1 Unit	Baik	APBD II
40.	Rumah Negara Gol. III	6 Unit	Baik	APBD II
41.	Jaringan Rumah Tangga	1 Unit	Baik	APBD II
42.	Sumur Gali	1 Unit	Baik	APBD II
43.	Kamus, Buku Referensi	12 Eksplr	Baik	APBD II
44.	Management & Perkantoran	9 Eksplr	Baik	APBD II

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

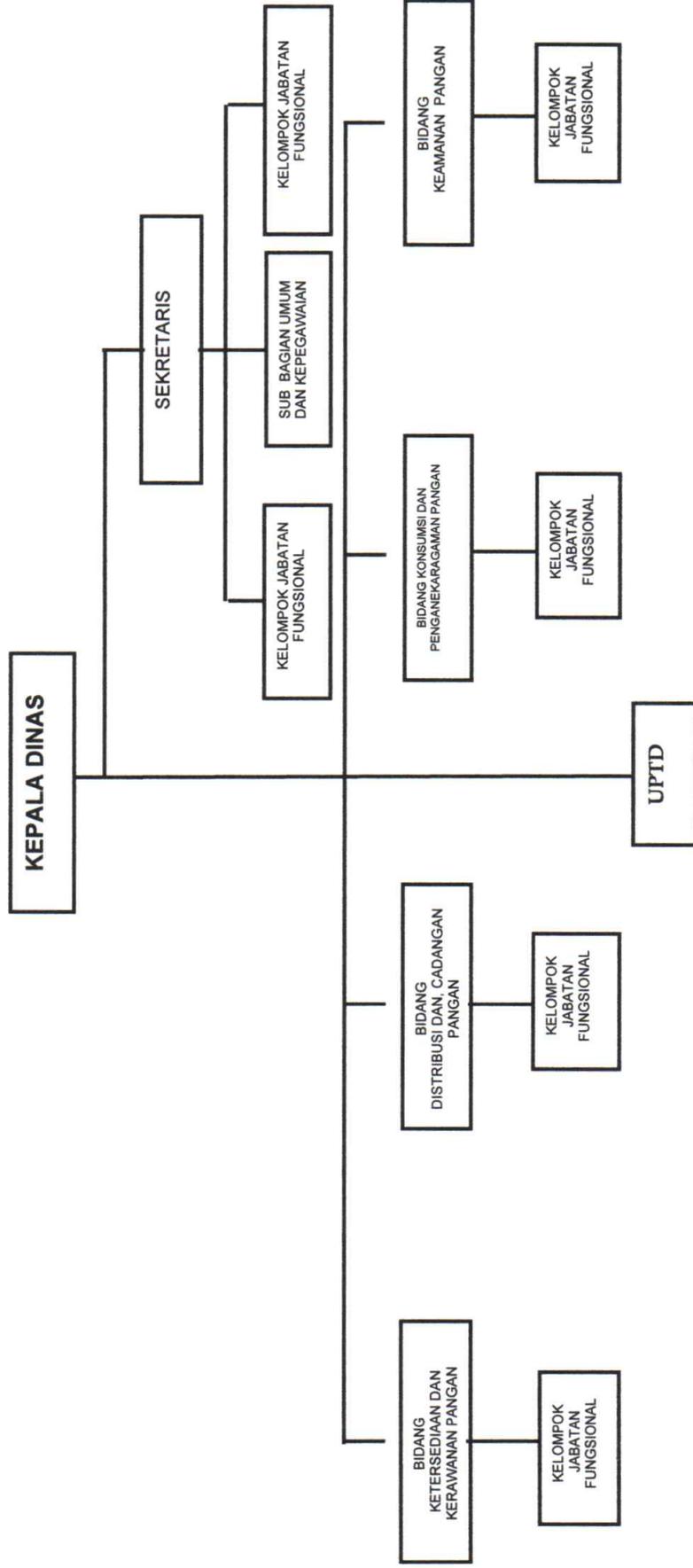
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu kepala Dinas sebagai pimpinan yang dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan kepala Sub bagian. Berikut ini bagan struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU sebagai berikut :



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN



BUPATI TIMOR TANGAH UTARA

DRS JUANDI DAVID



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya sangat signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah sumberdaya manusia (ASN) untuk menunjang pelaksanaan tugas akibat terdapatnya pejabat yang lowong karena pensiun;
2. Masih terbatasnya kompetensi dan kualitas SDM yang menangani ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan serta keamanan pangan ;
3. Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas ;
4. Ketersediaan pangan utama antar wilayah dan antar waktu tidak merata karena seringnya terjadi anomali iklim;
5. Masih terdapat wilayah yang rentan mengalami rawan pangan ;
6. Dokumen Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SKPG, FSVA, NBM, dan PPH) belum maksimal disusun dan digunakan oleh para pihak ;
7. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan sebagai akibat masih tingginya angka kemiskinan ;
8. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang menyebabkan tidak tercapainya Skor PPH Konsumsi ;
9. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal ;
10. Budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang kurang mendukung konsumsi pangan pola B2SA ;
11. Masih terdapat Pangan Segar Asal Tumbuhan yang terindikasi tidak aman dikonsumsi.

Perumusan Isu Strategis Tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU periode 2021 -2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Hasil Evaluasi Capaian kinerja Tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :



1. Ketersediaan dan kerawanan pangan

Masalah yang dihadapi adalah produksi dan kapasitas produksi pangan terbatas sebagai akibat dari menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat rendahnya curah hujan, masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan, lemahnya akses petani terhadap saprodi berkualitas, masih adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak sehingga menghambat upaya peningkatan produktifitas. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Terjadinya kerawanan pangan pada beberapa wilayah karena masih adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, dan rentannya kesehatan masyarakat. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen isyarat dini pencegahan kerawanan pangan belum optimal dilakukan.

2. Distribusi dan cadangan pangan

Masalah yang dihadapi adalah aksesibilitas atau keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang berkualitas sangat rendah akibat dari masih rendahnya pendapatan petani/masyarakat. Produksi pangan yang sifatnya semusim, sehingga terjadinya penurunan harga saat panen dan pada saat tertentu harga pangan meningkat dan menekan konsumen.

3. Penganekaragaman pola konsumsi pangan dalam rangka pengembangan menuju pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)

Dihadapkan pada permasalahan antara lain keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, lambatnya perkembangan penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial dan citra.

4. Keamanan pangan

Permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk pangan segar, belum memahami dan menerapkan cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar seperti penggunaan pupuk lebih cenderung ke arah pupuk



an organik (kimia) dengan dosis yang tinggi untuk memacu produksi dibandingkan penggunaan pupuk an organik.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Timor Tengah Utara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 – 2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
5. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor DPA/A.1/2/09.0.00.0.00.03.0000/001/2024 Tanggal 10 Januari 2024 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.03.0000/001/2024 tanggal 15 Oktober 2024

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran umum, Tujuan dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran dan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasikan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU.

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola petanggungjawaban terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU dibuat pada masa jabatannya dengan demikian akuntabilitas pemerintahan daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, forum SKPD sehingga Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU dengan stakeholder.

Selanjutnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun yang akan datang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten TTU. Visi mengandung makna bahwa Kabupaten TTU dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi harus mampu dibangun menuju Kabupaten TTU yang bermantabat, unggul, nyaman dan sejahtera.

Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri Melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”***



2. Misi.

Sedangkan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses
3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih
5. Pengembangan Kawasan strategis daerah dengan menata kota kefamenanu sebagai ibukota kabupaten dan wisata Kawasan strategis nasional (PKSKN), Kawasan pesisir pantai utara dan perbatasan

Untuk mewujudkan dan mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten TTU maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU mempunyai tugas pokok yaitu menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan yaitu meningkatkan pendapatan petani/masyarakat melalui pengembangan sector pertanian sebagai lokomotif yang mampu mengerakan sector-sektor lainnya. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten TTU. Kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan wilayah dapat terwujud melalui ketersediaan pangan yang disebabkan oleh meningkatnya produksi pangan dan peningkatan daya beli/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang berkualitas akibat meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat.

3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam janka waktu 1 (satu) tahun samapi 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran dupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis utama yang mendapat prioritas dari 4 (empat) program pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan ,sasaran dan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU sebagai berikut :



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan dan Konsumsi	91,2	93,4	75,1	80,1	85
2	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sakip (Skor)	52	54	56	67	80
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,87	80	80,44	81,58	82,15
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona Intregitas Pada Dinas Ketahanan Pangan	Nilai Evaluasi Inspektorat Daerah	1	1	1	45	50

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Defenisi Operasioani	Formulasi/Rumus/Perhitungan	Sumber Data
1	Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Kersediaan dan konsumsi	Skor	Skor PPH konsumsi merupakan ukuran tingkat keberagaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi skor PPH, maka kualitas konsumsi semakin baik	$PPH = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing - masing kelompok pangan}$	Dinas Pangan
2	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Meningkatkan Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Sakip	Nilai	Sakip adalah Nilai untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah/instansi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja keuangan . Semakin tinggi nilai Sakip maka kualitas kinerja instansi pemerintah baik.	Nilai Evaluasi Internal dari Inpektorat Daerah	Nilai Sakip dari Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM diperoleh dari	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Presepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bag. Organisasi



Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan Yang Membangun Zona Integritas			hasil pengukuran pendapat masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat. Semakin tinggi nilai IKM maka pelayan Dinas terhadap masyarakat baik.		
	Jumlah OPD Yang Menyandang Predikat WBK/WBBM (OPD)	Unit/Nilai	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas merupakan unsur penting atas penilaian pada Dinas terhadap kinerja dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	Inspektorat

B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut ini Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan dan konsumsi	Skor	75,1
2	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sakip (Skor)	Skor	56
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	80,44
		Jumlah OPD Yang Menyandang Predikat WBK/WBBM (OPD)	Jumlah OPD yang menyandang Predikat WBK/WBBM (OPD)	Unit/Nilai	1

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2021 - 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

2024 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU dengan uraian sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan dan Konsumsi	Skor	75,1,
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip (Skor)	Skor	56
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Presentase	80,44
4	Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan yang Membangun Zona Intregitas	Jumlah OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM (OPD)	Unit	1

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut ini rincian program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6

Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota			2.871.233.830
	Kegiatan :			
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	30 orang/bulan	2.621.263.870
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	20.000.000
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Logistik yang Disediakan	4 Paket	159.550.354
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Surat – Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kimunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	4 Laporan 12 Laporan 4 Laporan	16.920.925.
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang DiPelihara/Direhabilitasi	16 Unit 1 Unit	53.498.681
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			94.790.890



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

	Kegiatan :			
	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	54.791.042
		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	
		Tersedianya Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	4 Laporan	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 Laporan	
	2. Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Per kapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersedianya Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	
		Tersedianya Dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	39.999.848
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan			20.208.586
	Kegiatannya :			
	1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	20.208.586
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan			35.000.000
	Kegiatannya :			
	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000
	Jumlah			3.021.233.306

Untuk menunjang dan mewujudkan target kinerja tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan didukung dengan dana APBD II sebesar **Rp. 3.021.233.306** yang digunakan untuk melaksanakan 4 program di atas.

Pada tanggal Bulan Oktober 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan dalam program, kegiatan dan alokasi anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan dan Konsumsi	Skor	75,1,
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip (Skor)	Skor	56
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Presentase	80,44



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

4	Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan yang Membangun Zona Intregitas	Jumlah OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM (OPD)	Unit	1
---	--	--	------	---

Dengan Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota			2.898.233.759
	Kegiatan :			
	6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	30 orang/bulan	2.626.063.870
	7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	20.000.000
	8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Logistik yang Disediakan	4 Paket	183.400.283
	9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Surat – Menyurat	4 Laporan	15.270.925.
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kimunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	4 Laporan	
	10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	16 Unit	53.498.681
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang DiPelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			94.790.890
	Kegiatan :			
	3. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	54.791.042
		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	
		Tersedianya Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	4 Laporan	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 Laporan	
	4. Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Per kapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersedianya Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	39.999.848
		Tersedianya Dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

3	Program Penanganan Kerawanan Pangan			20.208.586
	Kegiatannya :			
	2. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	20.208.586
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan			35.000.000
	Kegiatannya :			
	2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000
	Jumlah			3.048.233.235

Untuk menunjang dan mewujudkan target kinerja tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan didukung dengan dana APBD II sebesar **Rp. 3.048.233.235** yang digunakan untuk melaksanakan 4 program



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi Amanah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara selaku pengemban Amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tahun 2024 menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat						
	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan dan konsumsi	75,1	80,1	106,65	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional,						



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

Transparan, Akuntabel dan Responsif							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sakip	56	66,35	118,48	Tercapai	Inspektorat	
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,4	0	0	Tidak Tercapai	Bag, Organisasi	
Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan yang Membangun Zona Integritas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	1	1	100	Tercapai	Inspektora	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan pangan Kabupaten TTU Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dari 4 (empat) indikator Kinerja Utama tersebut ada 3 (tiga) indikator kinerja yang mencapai target dan masuk kategori **"tercapai"** karena capaian kerjanya **106,65 %**, **118,48 %** dan **100 %**. yaitu Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH), Nilai Sakip dan Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD). Sedangkan 1 (satu) indikator yang bernilai 0 dan masuk kategori "tidak tercapai" yaitu Indikator Indeks Kepuasan Konsumen (IKM). 3 (tiga) indikator yang mencapai target dapat dijelaskan sebagai berikut :

2. Tahun 2024 Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan dan Konsumsi capaian kerjanya sebesar **80,1** dengan presentase capaian kerjanya **106,65 %**, dan masuk kategori **"tercapai"** yaitu melebihi target indikator kerjanya **75,1**. Capaian kerjanya mengalami kenaikan sebesar **5**. Adapun Capaian kinerja Indikator Utama Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) melebihi target yaitu 80,1 disebabkan oleh faktor-faktor antara lain yaitu :

- Faktor Internal

1. Ketahanan pangan masyarakat mulai meningkat dari aspek ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan
2. Peningkatan pendapatan masyarakat/petani
3. Pola Konsumsi masyarakat yang semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat/petani akan pentingnya konsumsi makanan yang bermutu dan bergizi.

- Faktor Eksternal

1. Kondisi curah hujan yang memadai, tingkat produksi komoditi pangan saat panen meningkat sehingga stok cadangan pangan di tingkat petani/masyarakat cukup
2. Pemanfaatan lahan pekarangan yang optimal sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

3. Nilai Sakip

Tahun 2024 target kinerja dari nilai sakip adalah 56, hasil capaian target kerjanya adalah 66,35 dengan persentase capaiannya 118,48 % dan termasuk kategori **"tercapai"**. Dapat dijelaskan bahwa nilai Sakip mencapai target karena pengiriman laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan sudah tepat waktu.



4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tahun 2024 target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 80,44. Hasil capaian target kinerjanya adalah 0 dan masuk kategori **“tidak tercapai”**. Terkait dengan capaian indikator kinerjanya tidak mencapai target atau 0 dapat dijelaskan bahwa belum dilaksanakan pengambilan data kepuasan di tingkat petani/masyarakat untuk mengukur IKM atas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja.

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
I	Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat							
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi	91,2	75,1	82,34	75,1	80,1	106,65
II	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif							
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)	Nilai Sakip (skor)	62	52,92	85,35	56	66,35	118,48
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,44	0	0	80,44	0	0
4	Optimalisasi Implementasi Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2	2,09	104,5	0	0	0
5	Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan yang Membangun Zona Intregitas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	1	1	100	1	1	100

Mengacu pada capaian kinerja pada tabel diatas dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tahun 2023 dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut ada 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai target dan masuk kategori **“tercapai”** karena capaian kinerjanya **104,5 %** dan **100 %**. yaitu Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD). Sedangkan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah Skor Pola Pangan Harapan dan Nilai Sakip dan Indeks Kepuasan Konsumen (IKM).
- b. Tahun 2024 terdapat hanya ada 4 (empat) indikator kinerja. Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut ada 2 (dua) indikator kinerja yang mengalami peningkatan/ kenaikan capaian kinerjanya dan masuk kategori **“tercapai”**. Dua indikator kinerja yang melebihi target yaitu Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) capaian kinerjanya 80,1 atau 106,65 % dan Nilai Sakip sebesar 66,35 atau 118,48% serta Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD) capaian kinerjanya



1 atau 100 % dan masuk kategori “ **tercapai** ” . Dan 1 (satu) indikator yang bernilai 0 dan masuk kategori “ **tidak tercapai**” yaitu Indikator Indeks Kepuasan Konsumen (IKM)

- c. Tahun 2023 dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut di atas 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak mencapai target dan masuk kategori “ **tidak tercapai**” dan 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai target dan masuk kategori “ **tercapai**”

Tahun 2024 hanya ada 4 (empat) indikator kinerja dan 3 indikator kinerja mencapai target dan masuk kategori “ **tercapai**” dan 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target dan masuk kategori “ **tidak tercapai**”. Penyebab tercapai dan tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)

1.1. Tahun 2023 Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan dan Konsumsi target capaian kinerjanya adalah 92,1 dan hasil capaian kinerjanya adalah sebesar **75,1** atau **82,34 %**, dan masuk kategori “ **tidak tercapai**”. Penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh faktor -faktor antara lain yaitu :

- Faktor Internal
 - a. Tingkat Pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih rendah akan konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman (B2SA) dalam keluarga
 - b. Pola konsumsi pangan masih didominasi oleh konsumsi karbohidrat (padi-padian, jagung, terigu dll) yang didukung dengan hasil analisis skor PPH data SUSENAS dengan skor Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 31,2 lebih besar dari skor Angka Kecukupan Energi maximum yaitu 25. Sedangkan untuk konsumsi protein, vitamin, mineral, lemak, minyak dan gula masih dibawah skor AKE maximum.
 - c. Rendahnya pendapatan dan perekonomian masyarakat sehingga mempengaruhi pola konsumsi keluarga yang B2SA
 - d. Tingkat harga kebutuhan pangan pokok yang semakin meningkat.
- Faktor Eksternal
 1. Kondisi curah hujan yang tidak menentu sehingga berdampak pada gagal tanam yang mempengaruhi hasil panen berkurang atau gagal panen.
 2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan yang optimal sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

1.2 Tahun 2024 target kinerjanya adalah **75,1** dan capaian kinerja adalah **80,1** atau **106,65 %**. Capaian kinerjanya ada mengalami kenaikan sebesar **5** dari tahun 2023 yaitu



capaiannya sebesar **75,1 atau 82,34%**. Kenaikan capaian kinerja skor Pola Pangan Harapan tahun 2024 disebabkan oleh faktor-faktor antara lain yaitu :

- Faktor Internal
 - a. Ketahanan pangan masyarakat mulai meningkat dari aspek ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat/petani
 - a. Pola Konsumsi masyarakat yang semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat/petani akan pentingnya konsumsi makanan yang bermutu dan bergizi.
- Faktor Eksternal
 - a. Kondisi curah hujan yang memadai, tingkat produksi komoditi pangan saat panen meningkat sehingga stok cadangan pangan di tingkat petani/masyarakat cukup
 - b. Pemanfaatan lahan pekarangan yang optimal sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

2. Nilai Sakip

- 2.1 Tahun 2023 target kinerja dari nilai sakip adalah 56, hasil capaian target kinerjanya adalah 52,92 dengan persentase capaiannya 94,5%. Dapat dijelaskan bahwa nilai Sakip tidak mencapai target dan masuk kategori **“tidak tercapai”** sebabkan oleh keterlambatan dalam pengiriman laporan kinerja dan keuangan dan ini akan menjadi perhatian untuk kedepan akan diperbaiki
- 2.2 Tahun 2024 target kinerja dari nilai sakip adalah 56, hasil capaian target kinerjanya adalah 66,35 dengan persentase capaiannya 118,48 % dan masuk kategori **“tercapai”**. Dapat dijelaskan bahwa nilai Sakip mencapai target karena pengiriman laporan kinerja dan keuangan sudah tepat waktu.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- 3.1 Tahun 2023 target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Targetnya adalah 79,87. Hasil capaian target kinerjanya adalah 0. Terkait dengan capaian indikator kinerjanya tidak mencapai target atau 0 dapat dijelaskan bahwa belum dilaksanakan pengambilan data di tingkat petani/masyarakat untuk mengukur IKM atas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.
- 3.2 Tahun 2024 target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 80,44. Hasil capaian target kinerjanya adalah 0. Terkait dengan capaian indikator kinerjanya tidak mencapai target atau 0 dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 belum dilaksanakan pengambilan data



di tingkat petani/masyarakat untuk mengukur IKM atas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan akan menjadi perhatian dan ditidakanjuti pada tahun 2025.

4. Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

4.1 Target kinerja dari Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 adalah 2, hasil capaian kinerjanya adalah 2,09 atau 104,5% yang berarti capaian kinerjanya melebihi target dan masuk kategori "tercapai".

4.2 Tahun 2024 Indikator kinerja Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

5. Jumlah OPD yang menyangang predikat WBK/WBBM (OPD)

5.1 Tahun 2023 Target kinerja untuk indikator Jumlah OPD yang menyangang predikat WBK/WBBM (OPD) adalah 1 dengan hasil capaiannya adalah 1 atau 100% dan masuk kategori "tercapai".

5.2 Tahun 2024 Jumlah OPD yang menyangang predikat WBK/WBBM (OPD) adalah target di tahun 2024 adalah 1 dan capaian kinerjanya adalah 1 atau 100% masuk kategori "tercapai" karena laporan keuangan dan kinerjanya baik dan tidak ada temuan dalam pelaporan pertanggungjawabannya

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU perode 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Table with 6 columns: No, Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja Tahun 2024, Target Akhir 2026, Tingkat Kemajuan. It lists various strategic goals and their performance metrics.



Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan dan diketahui tingkat kemajuan capaian sasaran strategis sampai dengan target akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) pada tahun 2024 mencapai 80,1 sedangkan target pada akhir RPJMD tahun 2026 adalah sebesar 100 sehingga capaian tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD mencapai 94,23
2. Nilai Sakip tahun 2024 mencapai 66,35 sedangkan target pada akhir RPJMD tahun 2026 adalah sebesar 80 sehingga capaian tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD mencapai 94,78
3. Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) pada tahun 2024 tidak mencapai atau bernilai 0 karena sedangkan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah sebesar 82,15 sehingga capaian tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD adalah 0
4. Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor) tidak mencapai atau 0 karena dalam tahun dalam perjanjian kinerja tahun 2024 tidak termuat sebagai salah satu Indikator kinerja utama. Target akhir RPJMD tahun 2026 adalah sebesar 2,7 sehingga capaian tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD adalah 0.
5. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD) pada tahun 2024 mencapai 1 sedangkan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah sebesar 5 sehingga capaian tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD adalah 20

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat				
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi	80,1	95,2	84,13
	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip (skor)	66,35	95	69,84
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKM)	0	90	0
4	Optimalisasi Implementasi Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	0	3,12	0
5	Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan yang Membangun Zona Intregitas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	1	85	1,17



Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	<p>Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat</p> <p>Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan</p> <p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI) 2. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 3. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Stragtegis <p>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun <p>Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p> <p>Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p>	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi	75,1	80,1	106,65	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan pangan masyarakat mulai meningkat dari aspek ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan • Pola konsumsi pangan masyarakat yang sudah beragam, bergizi, seimbang dan aman • Adanya peningkatan pendapatan keluarga masyarakat • Meningkatnya kesadaran masyarakat/petani akan pentingnya konsumsi pangan yang bergizi dan bermutu 	Pembinaan, Pendampingan, monitoring dan Evaluasi tetap terus dilaksanakan oleh Dinas pada Petani/ masyarakat terhadap ketersediaan dan konsumsi pangan dalam keluarga yang B2SA



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Sefar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						
2	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip (skor)	56	66,35	118,48	Pengiriman data dan laporan keuangan dan Kinerja setiap bulan sudah berjalan dengan baik dan lancar	Pengiriman Laporan Keuangan dan Kinerja akan tetap menjadi perhatian dari Dinas untuk tepat waktu.
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKM)	80,44	0	0	Kegiatan sosialisasi dan pengambilan data IKM di tingkat petani/masyarakat penerima bantuan atas pelayanan Dinas belum berjalan sebagaimana mestinya	Pelaksanaan sosialisasi dan Pengambilan data IKM ditingkat petani/masyarakat penerima bantuan atas pelayanan Dinas
4	Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan yang Membangun Zona Intregitas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	1	1	100	Terdapat peningkatan dalam capaian kinerja perangkat daerah atas Pelaporan Keuangan dan Kegiatan.	Tetap mempertahankan kinerja Dinas akan pelaporan Keuangan dan Kegiatan
Rata-rata					81,28		

Data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU masuk kategori **"tercapai"** karena nilai rata-ratanya 81,28 %.

Tahun 2024 ada tiga indikator kinerja yang mencapai target yaitu Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) target indikatornya adalah 75,1 dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 80,1 atau 106,65% . Nilai Sakip targetnya adalah 56 dengan realisasi capaian kinerjanya adalah sebesar 66,35 atau 118,38% dan Jumlah OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM (OPD) targetnya adalah 1 dengan realisasi capain kinerjanya sebesar 1 atau 100%. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) targetnya 80,44 dengan realisasi capaiannya kinerjanya adalah 0 . Penyebabnya adalah belum dilaksanakan sosialisasi dan pengambilan datanya ditingkat petani/masyarakat penerima bantuan program/kegiatan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas dan di tahun 2025 ini akan menjadi perhatian dan ditindalanjuti dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang		
1.	Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Konsumsi	80,1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Menunjang		
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sbb :					
				1. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	100	Menunjang		
				2. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	100	Menunjang		
				3. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	100	Menunjang		
				4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	100	Menunjang		
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					
				5. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Meningkatnya Ketersediaan Protein Per Kapita Meningkatnya Ketersediaan Energi Per Kapita	100	Menunjang		
				Program Penanganan Kerawanan Pangan					
				Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota					
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya Penanganan Kerawanan Pangan	100	Menunjang		
Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan									
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota									
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100	Menunjang						



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

1.	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	66,35	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten			Menunjang
				1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang

Sumber Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026

Dari tabel diatas dilihat bahwa pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2024 sebesar 100% atau termasuk kategori dengan kinerja **"Tercapai"**

Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa tiap indikator kinerja program mencapai target. Dapat dijelaskan tiap indikator kinerja program dapat mencapai target karena didukung oleh faktor - faktor sebagai berikut :

1. Faktor internalnya antara lain :
 - a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
 - c. Telah diimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
 - d. Telah dilaksanakan setiap triwulan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
2. Penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan antara lain :
 - a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari semua perangkat SKPD Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan bidang pangan.



- b. Adanya dukungan kerja yang baik dari para Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan, dan masyarakat sasaran penerima program/kegiatan.

A. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tahun 2024 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Anggaran/ Program/Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	2.898.233.759	2.383.737.928	82,25
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.626.063.870	2.123.614.378	80,87
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	2.559.463.870	2.057.014.378	80,37
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.600.000	66.600.000	100
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	20.000.000	20.000.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.400.283	178.896.135	97,54
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.999.998	64.310.856	96,97
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.420.285	11.420.279	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.980.000	103.165.000	96,43
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.270.925	12.019.000	78,71
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.630.925	2.622.000	99,66
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.650.000	7.630.000	99,74
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.990.000	1.767.000	35,41
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.498.681	49.208.415	88,46
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	45.499.785	42.533.415	93,48
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bahan Bangunan Lainnya	7.998.896	6.675.000	83,45
II	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	226.706.985	220.240.244	99,73
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	110.624.485	110.120.122	99,49
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)	12.000.000	5.500.000	45,83
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	11.500.000	10.850.000	94,35
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	19.791.042	19.591.042	98,99
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Strategis	11.500.000	11.200.000	97,39
2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	39.999.848	39.932.622	99,83
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	39.999.848	39.932.622	99,83



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

III	Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.208.586	20.208.586	100
1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.208.586	20.208.586	100
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.208.586	20.208.586	100
IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan	35.000.000	35.000.000	100
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Sefar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	100
	Total	3.048.233.235	3.526.000.178	82,87

B. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian (%)	
1.	Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat							
	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	75,1	80,1	106,65	39.999.848	39.932.622	99,83%	107,83
2	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	56	66,35	118,48	338.769.889	326.723.550	99,28	121,85
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	80,44	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan yang Membangun Zona Intregitas	1	1	100	0	0	0	0
Rata-rata								10,81



Dari Tabel data diatas dapat disimpulkan berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variable capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum^{n} i=1 (PAKi \times Cki) - RAKi}{\sum^{n} i=1 (PAKi \times Cki)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran I
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran I
Cki : Capaian Keluaran I

Dari Nilai rata-rata perhitungan efisiensi yang didapatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tahun 2024 yaitu sebesar 10,81%. Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tahun 2017 batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%. Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam kategori efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahu 2024 walau tidak semua capaian kinerja mencapai target.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Table with 9 columns: No, Program/Kegiatan, Indikator Kinerja (Target, Realisasi, % Capaian), Anggaran (RP) (Anggaran, Realisasi), % Capaian, and Tingkat Efisiensi. It contains data for 'Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota' and 'Administrasi Keuangan Perangkat Daerah'.



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTU

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	100	66.600.000	66.600.000	100	9,900,00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	2 org ASN	2 org ASN	100	20.000.000	20.000.000	100	9,900,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	100	64.999.998	64.310.856	98,93	10,007,16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100	11.420.285	11.420.279	100	9,900,01
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	106.980.000	103.165.000	96,43	10,269,80
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	100	2.630.925	2.622.000	99,66	9,934,04
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100	7.650.000	7.630.000	99,74	9,926,21
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	4 Laporan	100	4.990.000	1.767.000	35,41	10,597,42
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	16 Unit	16 Unit	100	45.499.785	42.533.415	93,48	11,883,36
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bahan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	7.998.896	6.675.000	83,45	21,718,18
II	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)	1 Unit	1 Unit	100	12.000.000	5.500.000	45,83	10,499,08
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1 Unit	1 Unit	100	11.500.000	10.850.000	94,35	10,002,09
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100	19.791.042	19.591.042	98,99	10,167,86
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 Dokumen	1 Dokumen	100	11.500.000	11.200.000	97,39	9,899,81
2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TTTU

	sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	39.999.848	39.932.622	99,83	4,960,67
III	Program Penanganan Kerawanan Pangan							
1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	20.208.586	20.208.586	100	4,960,67
IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan							
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Sefar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	35.000.000	34.980.000	99,94	9,905,72
	Total				3.048.233.235	2.526.000.178		1,193

Untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 dalam rangka mencapai target indikator kerja yang telah dirumuskan dalam perjanjian kinerja maka dialokasikan dana sebesar **Rp. 3.048.233.235,-** Dari anggaran tersebut yang terealisasi tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 2.526.000.178,- (82,87%)**. Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTTU terhadap program dan kegiatan telahn efisiensi karena capaian sudah 100% dengan nilai tingkat efieinsinya sudah diatas 0 yaitu sebesar **1,193**.



BAB. IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU dalam merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA), dengan cara mempertimbangkan nilai indikator kinerja masukan (Input), keluaran (Output) dan hasil (Outcome).

Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU menetapkan sebanyak dua tujuan, empat sasaran dengan empat Indikator kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan, sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tujuan menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat terdiri 1 (satu) Indikator kinerja Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) dengan capaian kinerjanya sebesar 80,1 atau 106,65% dengan kategori "tercapai"
2. Tujuan Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Nilai Sakip dengan capaiannya 66,35 atau 118,48% dengan kategori "tercapai", Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 0 dengan kategori "tidak tercapai" serta Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD) dengan capaian kinerjanya sebesar 1 dengan kategori "tercapai".
3. Sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan terdiri dari 1 (satu) indikator Kinerja dengan capaian kinerjanya sebesar 80,1 atau 106,65% dengan kategori "tercapai"
4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah terdiri dari 1 (satu) indicator kinerja yaitu Nilai Sakip dengan capaiannya 66,35 atau 118,48% dengan kategori "tercapai"



5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 0 dengan kategori “tidak tercapai”
6. Sasaran Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan yang Membangun Zona Integritas Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD) dengan capaian kinerjanya sebesar 1 dengan kategori “tercapai”

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran tersebut secara umum dapat digambarkan bahwa hanya 1 (satu) indikator kinerjanya yang capaian kinerjanya sebesar 0 dengan kategori “tidak tercapai” yang tidak mencapai target sesuai perjanjian kinerja. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut masing-masing capaiannya sebesar 80,1 atau 106,65%, 66,25 atau 118,48% dan sebesar 1 atau 100% dan termasuk kategori “tercapai” dan mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 sebesar **Rp. 3.048.233.235,-** dan yang terealisasi tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 2.526.000.178,- (82,87%)**. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2024 serapan anggaran sebesar **Rp. 2.526.000.178,- (82,87%)** dan nilai efisiensi anggaran sebesar **2,14 %** dengan tingkat efisiensinya **1,193**

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU kepada pihak – pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kabupaten Timor Tengah Utara

Kefamenanu, 18 Maret 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU, *de*



IR MARSELINA SUMU
Pembina Utama Muda
NIP. 196606141992032011